

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki bentuk pemerintahan demokratis. Konsep demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Warga negara memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah keadaan masyarakatnya. Kesejahteraan rakyat berada di tangan pemimpin yang mengemban tanggung jawab negara, rakyat akan merasa damai ketika pemimpin negara memperhatikan dari segi atau bidang manapun. Rakyat tidak hanya memilih pemimpin yang bertanggung jawab, segi lain juga yang harus diperhatikan yaitu pemimpin yang adil dan mampu mengatasi setiap permasalahan yang timbul di dalam masyarakat ataupun dalam negara.

Salah satu syarat pokok atau asas penyelenggaraan pemerintah yang demokrasi di Indonesia diselenggarakannya pemilihan umum (pemilu). Pemilihan umum presiden dan wakil presiden diselenggarakan secara demokratis dan beradab melalui partisipasi rakyat seluas-luasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan presiden dan wakil presiden berdasarkan Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang No. 42 tahun 2008 mempersyaratkan pengajuan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik harus mendapatkan 20 persen kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau 25 persen suara nasional. Pemilihannya mempersyaratkan mendapatkan 50 persen suara lebih yang tersebar 1/3 wilayah provinsi, jika tidak tercapai maka dilakukan pemilu ulang menggunakan syarat suara terbanyak yang akan dilantik. Pemilu merupakan event penting dalam proses demokrasi untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, pemilu mengajarkan kepada masyarakat agar ikut andil dalam pengambilan keputusan politik dengan cara memberikan suara kepada partai politik tertentu.

KPU merupakan lembaga yang menyelenggarakan pemilu, tugas dan wewenang KPU dalam menyelenggarakan pemilu tidak hanya berhubungan dengan partai politik peserta pemilu, tetapi harus dengan masyarakat sebagai pemberi suara dalam pemilu. Peran KPU dalam menyosialisasikan kegiatan pemilu kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar bersedia memberikan suara pada saat pemilu. Sebelum diadakannya pemilu, KPU menyelenggarakan penyampaian visi-misi dari calon peserta pemilu, tujuannya untuk memberikan pengenalan awal kepada masyarakat mengenai visi-misi sebelum dilaksanakannya debat.

Penyampaian visi-misi pasangan calon pilpres 2019 dilaksanakan pada 09 Januari 2019 atau delapan hari sebelum dilakukannya debat capres dan cawapres. Debat capres dan cawapres berlangsung selama lima putaran dengan jadwal dan tema yang berbeda. Debat pertama pada tanggal 17 Januari bertempat di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan dengan tema hukum, HAM, korupsi, dan terorisme, peserta debat yaitu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Debat kedua pada tanggal 17 Februari 2019 bertempat di Hotel Fairmont, Senayan dengan tema energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, peserta debat yaitu calon presiden. Debat ketiga pada tanggal 17 Maret 2019 bertempat di Hotel Sultan, Senayan dengan tema pendidikan kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan budaya, peserta debat yaitu calon wakil presiden. Debat keempat pada tanggal 30 Maret 2019 bertempat di Balai Sudirman, Tebet dengan tema ideologi, pemerintahan keamanan serta hubungan internasional, peserta debat yaitu calon presiden. Debat kelima pada tanggal 13 April bertempat di Hotel Bidakara, Pancoran dengan tema ekonomi dan kesejahteraan sosial, keuangan, investasi, serta industri, peserta debat yaitu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Peserta debat nomor urut satu yaitu Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H. C.) K. H. Ma'ruf Amin dan paslon nomor urut dua yaitu Letnan Jendral TNI (Purn) H. Prabowo Subianto Djojohadikusumo dan Sandiaga Salahudin Uno.

Keempat peserta debat tersebut tidak asing di telinga masyarakat Indonesia, dapat dijumpai diberbagai media atau stasisun televisi, bahkan Bapak Joko Widodo merupakan presiden Republik Indonesia ke-7 atau menjabat sejak tahun

2014. Seorang *public figure* tentu menjadi panutan bagi banyak orang, oleh sebab itu mereka para kandidat harus benar-benar memperhatikan kepribadiannya mulai dari segi penampilan dan juga aspek bicara ketika di depan masyarakat umum, agar masyarakat menilai dengan baik calon-calon pemimpin Indonesia. Presiden adalah pemimpin rakyat, sehingga harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakatnya. Bahasa Indonesia merupakan bahasa kesatuan yang harus dijaga, karena bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa, seseorang terlahir dari berbagai daerah, suku, ras, agama yang berbeda dan tentunya mempunyai bahasa daerah yang berbeda pula. Perbedaan-perbedaan tersebut menimbulkan sebuah keberagaman yang menarik sehingga perlunya dilestarikan.

Indonesia merupakan negara yang beranekaragam, mulai dari suku, budaya, agama, dan bahasa, di Indonesia memiliki tiga kelompok bahasa, yaitu bahasa nasional, bahasa daerah, dan bahasa asing. Masyarakat Indonesia tergolong ke dalam masyarakat bilingual (menguasai dua bahasa atau lebih) bahkan multilingual (menguasai lebih dari dua bahasa). Rahardi (2010: 6), menyatakan bahwa bilingualisme merupakan penguasaan dua bahasa, yaitu bahasa pertama dan bahasa kedua, hal ini menunjukkan adanya percampuran bahasa saat komunikasi atau lainnya. Situasi formal seperti debat, bahasa yang digunakan yaitu bahasa Indonesia yang baik, dalam debat capres dan cawapres 2019 yang ditayangkan langsung di stasiun televisi serta ditonton oleh seluruh masyarakat Indonesia, peserta debat menggunakan bahasa Indonesia ketika berkomunikasi, namun ada bahasa yang bercampur pada saat debat berlangsung. Hal tersebut terjadi baik disengaja ataupun tidak disengaja, dengan begitu terjadilah campur kode pada saat debat berlangsung.

Campur kode bukanlah sebuah kesalahan berbahasa melainkan fenomena bahasa unik yang terjadi di masyarakat. Melestarikan bahasa Ibu atau bahasa pertama memang harus dilakukan, karena seseorang terlahir di suatu daerah maka bahasa yang diperoleh sejak lahir selalu melekat dalam dirinya walaupun orang tersebut dikemudian hari merantau ke sebuah daerah atau negara bukan asalnya. Kholik (2013: 3), menjelaskan bahwa campur kode merupakan fenomena penyisipan bentuk satuan bahasa yang timbul dari dalam atau luar. Senada dengan Rokhman (2013: 39), campur kode merupakan fenomena penggunaan dua bahasa

atau lebih dengan saling menyisipkan antarunsur bahasa satu ke bahasa lain. Faktor yang mempengaruhi adanya campur kode salah satunya disebabkan oleh kurangnya penguasaan bahasa Indonesia atau faktor lainnya.

Penelitian ini dilakukan karena adanya keunikan keberagaman bahasa yang ada di Indonesia pada saat acara debat berlangsung. Keunikan terjadi pada saat Pak Jokowi dan Pak Prabowo membuka pembicaraan di awal penyampaian visi-misi atau ketika mengucapkan salam pembuka, kedua tokoh tersebut menyapa masyarakat Indonesia dengan ungkapan lima salam dari berbagai agama. Salam pertama berbunyi *Assalamu'alaikum* yang berasal dari agama Islam artinya 'keselamatan, kesejahteraan, dan kedamaian'. Salam kedua berbunyi Salam sejahtera bagi kita semua (shalom) yang berasal dari agama Nasrani, shalom berasal dari bahasa Ibrani artinya 'sejahtera, tidak ada yang hilang, tidak ada perpecahan, kesehatan, dan kelengkapan'. Salam ketiga berbunyi *Om swastiastu* yang berasal dari agama Hindu, di Bali salam ini memiliki arti 'mendoakan lawan bicara agar diberkahi kerahayuan, dan kebahagiaan selama hidupnya'. Salam keempat berbunyi *Namo Buddhaya* yang berasal dari agama Buddha, *Namo Buddhaya* berasal dari bahasa Sansekerta yang artinya 'terpujilah semua Buddha'. Salam kelima berbunyi Salam kebajikan yang berasal dari agama Konghuchu artinya 'hanya kebajikan Tuhan berkenan atau hanya orang yang hidupnya menjalankan kebajikan saja yang berkenaan kepada Tuhan'.

Alasan lain yang melatarbelakangi penelitian ini yaitu karena timbulnya ikatan emosional dari masing-masing peserta debat yang ikut dirasakan oleh masyarakat atau penonton. Contohnya ketika Pak Prabowo menyampaikan sebuah ungkapan berbahasa Jawa yaitu *kong-kalengkong*, *pat-gulipat*, *etok-etok* sontak audiensi tertawa karena ungkapan tersebut, hal ini membangun emosional tamu undangan dari masing-masing paslon. Campur kode yang terjadi pada debat capres dan cawapres yaitu campur kode berbentuk kata, berbentuk frasa, dan berbentuk klausa dengan jenis campur kode ke luar dan campur kode ke dalam, beberapa kali peserta debat mencampur kode dengan menyisipkan bahasa Jawa ke Indonesia dan bahasa asing ke Indonesia. Gaya dan nada bicara juga muncul dari masing-masing peserta debat yang menunjukkan ciri khas dari pribadi tokoh

tersebut, hal ini mengakibatkan semakin memanasnya acara debat saat berlangsung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana bentuk campur kode yang terjadi pada dialog debat capres dan cawapres 2019?
2. Apa faktor yang memengaruhi terjadinya campur kode pada dialog debat capres dan cawapres 2019?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mendeskripsikan bentuk campur kode yang terjadi pada dialog debat capres dan cawapres 2019.
2. Mendeskripsikan faktor yang memengaruhi terjadinya campur kode pada dialog debat capres dan cawapres 2019.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis, khususnya dalam kajian Sociolinguistik.

1. Manfaat Teoretis

Penelitian dapat diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pembaca agar memperdalam pemahaman dan menambah wawasan mengenai kajian Sociolinguistik, terkait campur kode pada dialog debat capres dan cawapres 2019. Penelitian ini sebagai bentuk aplikasi pemahaman penulis terhadap teori kebahasaan, khususnya mengenai campur kode dalam pemahaman bahasa Indonesia berdasarkan kajian Sociolinguistik.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini yaitu :

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu bahasa dan memperkaya referensi keilmuan bahasa terkait dengan campur kode dalam kajian Sociolinguistik.

- b. Bagi peneliti, mampu membantu peneliti dalam menyelesaikan masalah mengenai campur kode dan faktor penyebabnya pada dialog debat capres dan cawapres 2019.
- c. Penelitian ini diharapkan sebagai bahan pembanding dalam penelitian selanjutnya.

